

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dalam khasanah pemikiran pendidikan Islam merupakan bentuk aktualisasi atas tujuan penciptaan manusia oleh Allah swt sebagai hamba-Nya (*abdullah*) dan pengganti kepemimpinan-Nya di dunia (*khalifatullah*), yang pada akhirnya bertujuan agar manusia menyembah (beribadah) kepada-Nya.

Dalam tataran semacam ini, setiap pribadi muslim akan selalu berusaha menjalankan aktivitas pendidikannya dengan bersungguh-sungguh, bukan sekedar pragmatis, karena semua aktivitasnya akan dicatat oleh Tuhannya, yakni Allah SWT. Aktivitasnya didasarkan pada upaya menggapai nilai esensial, karena Allah menilai berdasarkan nilai hati dan amal. Oleh karena itu, aktivitas pendidikan perlu dirancang dan dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui manajemen pendidikan yang profesional. Hal demikian didasarkan pada kondisi faktual, bahwa kebangkitan dan kemajuan beberapa lembaga pendidikan (Islam) di berbagai daerah, disebabkan pengembangan manajemennya.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, tata cara, tata krama pergaulan, bahasa, dan pola kehidupan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Atas dasar inilah kurikulum muatan lokal dimasukkan dalam pendidikan, sebagai suatu upaya

pelestarian, sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan ciri khas dan jati dirinya.

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun martabat bangsa dan negara. Landasan dasar pendidikan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 yang mewajibkan kepada setiap warga negara memperoleh pengajaran, bertujuan menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral.¹

Pemerintah Indonesia berusaha meningkat kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan menetapkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 dan 25 tentang Otonomi Daerah, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Momentum

¹ Zainuddin, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 45.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hlm. 6

otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang pada gilirannya akan mengarah pada kemandirian lembaga pendidikan jika tidak segera disikapi, maka akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi lembaga pendidikan seperti sekolah.³

Pembaruan pendidikan nasional berlanjut dengan diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur desentralisasi di bidang pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan adalah pemberian kewenangan dan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemberian otonomi ini terjadi pada tingkat pemerintah dengan dinas pendidikan sebagai pelaksananya dan juga level sekolah yang dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah.

Isu tentang Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) sebenarnya merupakan tema sentral dalam reformasi pendidikan di berbagai negara. Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai suatu pengalihan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pengelolaan dari birokrasi sentral kepada pengelola terdepan pendidikan, yaitu sekolah dan komunitasnya.

Manajemen sekolah pada hakekatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah juga merupakan ruang

³ Mizan Sya'roni, *Manajemen Berbasis Madrasah*, dalam Jurnal Pendidikan Islam, Volume 12, Nomor 2, (Oktober 2002), hlm. 238.

lingkup manajemen pendidikan. Dengan kata lain, manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas pada satu sekolah saja, sedang manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar (*suprasistem*) secara regional, nasional, bahkan internasional.

Kurikulum suatu lembaga pendidikan tidak sekedar daftar mata pelajaran yang dituntut di dalam suatu jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengertiannya yang luas, kurikulum berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran tertentu, juga berkenaan dengan proses yang terjadi di dalam lembaga (proses pembelajaran), fasilitas yang tersedia yang menunjang terjadinya proses, dan akhirnya produk atau hasil dari proses tersebut.⁴

Kurikulum dan program pengajaran merupakan salah satu komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik oleh manajemen sekolah. Menurut E. Mulyasa dalam buku *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, bahwa komponen-komponen sekolah ada tujuh, yaitu (1) Kurikulum dan program pengajaran, (2) Tenaga kependidikan, (3) Kepeserta

⁴ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 174.

didikan, (4) Keuangan, (5) Sarana dan prasarana Pendidikan, (6) Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, dan (7) Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.⁵

Kurikulum sebagai input pendidikan yang diberlakukan bagi peserta didik harus mampu meng-*cover* masa yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik itu sendiri, baik dalam kaitannya dengan posisinya sebagai makhluk individu maupun sosial. Berkaitan dengan ini, masalah pendidikan agama yang tujuan dasarnya adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt serta berbudi luhur, tentu harus diberikan sedemikian rupa dengan menggunakan metodologi yang aplikatif, sehingga pengamalan ajaran agama bisa dilestarikan oleh peserta didik dalam realitas kehidupan pribadi maupun masyarakatnya.⁶

Kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat merupakan standar yang berlaku secara nasional. Dalam implementasinya, daerah dan sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan silabus (memperdalam, memperkaya, memodifikasi), namun tetap berada dalam koridor isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Daerah dan sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), cet. ketujuh, hlm. 39.

⁶ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), hlm. 8.

silabus mata pelajaran ketrampilan pilihan, yang merupakan unggulan daerah (muatan lokal).⁷

Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 38 ayat 1, yang berbunyi: “Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan”.⁸

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, muatan lokal telah dijadikan strategi pokok untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan sejauh mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan kurikulum muatan lokal ini, setiap sekolah diharapkan mampu mengembangkan program pendidikan tertentu yang sesuai dengan keadaan dan tuntutan lingkungannya.⁹

Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak melalui pengajaran ilmu pengetahuan, dan pemahaman nilai yang bersumber dari kurikulum. Pengajaran dan pembelajaran adalah kata kunci dari proses sosialisasi yang ada di sekolah. Para guru menjadi pelaku proses transformasi nilai-nilai budaya kepada

⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyuksesan MBS dan KBK*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2003), hlm. 20-21.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 89

⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, *op. cit.*, hlm. 40.

semua anak didik untuk menjadi warga masyarakat yang berbudaya dan baik.¹⁰

Proses belajar mengajar merupakan aktivitas yang masuk ke dalam suatu sistem di persekolahan (makro). Tetapi secara mikro, di dalam kelas proses pengajaran juga mempunyai konsep sistem, karena di dalamnya ada proses manajemen yang dijalankan oleh guru. Sebagai tugas professional yang dilaksanakan oleh guru, kegiatan mengajar dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan murid untuk belajar, memanfaatkan sumber daya yang ada dalam pembelajaran, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar.¹¹

Pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak unsur seperti guru, peserta didik, materi, media, metode, dan lingkungan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh bersinerginya semua unsur yang terkait dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, kesinergian sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Demikian halnya dengan pembelajaran kurikulum muatan local keagamaan yang dilaksanakan dimadrasah, juga memerlukan sinergisitas antara semua unsur yang terkait dalam proses

¹⁰ Syafaruddin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), cet. I, hlm. 6.

¹¹ *Ibid*, hlm. 48.

pembelajaran tersebut agar tujuan pembelajaran muatan lokal ini dapat tercapai.

Agar semua unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran dapat bersinergi, diperlukan manajemen untuk mengelola, mengatur, dan menata semua unsur pembelajaran, dengan perkataan lain manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru, tidak terkecuali guru muatan lokal. Tugas tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Pada saat ini MI NU Banat Kudus masih adanya fenomena bahwa pembelajaran muatan lokal ditengarai belum berhasil dalam merubah akhlak peserta didik, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya murid sekolah yang belum mengaplikasikan pengetahuan agama (Islam) yang didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut diduga erat kaitannya dengan proses pembelajaran muatan di sekolah, dan apabila ditelusuri lebih jauh akan sampai pada pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dan tentu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan guru sebagai seorang manajer proses pembelajaran muatan lokal, sehingga hal inilah yang menjadikan perlu adanya kajian terhadap manajemen pembelajaran muatan lokal muatan lokal.

Melihat berbagai permasalahan di atas, madrasah Banat mengambil kebijakan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal yang berbasis agama. Hal ini merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan

perkembangan anak. Pengambilan kebijakan tersebut juga disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan madrasah yang telah disepakati bersama oleh BPPMNU Banat (Badan Penyelenggara Pendidikan Madrasah Nahdlatul Ulama' Banat).

Mengingat belum banyaknya karya tulis yang mengulas tentang kebijakan kurikulum muatan lokal, penulis mencoba untuk melakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi, tantangan, dan pelaksanaan kebijakan kurikulum muatan lokal. Maka dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan kurikulum muatan lokal di MI NU Banat Kudus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana kebijakan kurikulum muatan lokal dalam membentuk pribadi berakhlaq mulia di MI NU Banat Kudus?
2. Bagaimana implementasi kebijakan kurikulum muatan lokal di MI NU Banat Kudus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kebijakan kurikulum muatan lokal dalam membentuk pribadi berakhlaq mulia di MI NU Banat Kudus.
2. Mengetahui implementasi kebijakan kurikulum muatan lokal di MI NU Banat Kudus.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah

1. Secara teoritis:

Untuk menambah referensi mengenai kajian kurikulum muatan lokal dalam membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlaq mulia, serta tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dari pihak yang berkompeten.

2. Secara praktis:

- a. Bagi Dinas Pendidikan: sebagai bahan masukan dan referensi tentang implementasi kebijakan kurikulum muatan lokal dalam membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlaq mulia.
- b. Bagi Sekolah: dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi untuk pengembangan madrasah ibtidaiyah NU Banat Kudus dalam hal implementasi kebijakan kurikulum muatan lokal dalam membentuk kepribadian peserta didiknya.
- c. Bagi guru: melalui penelitian ini dapat membantu guru untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan

kurikulum muatan lokal dalam membentuk kepribadian peserta didiknya.

- d. Bagi siswa: dari penelitian ini siswa dapat mengetahui yang akan diperoleh dari kurikulum muatan lokal dalam membentuk kepribadian mereka.